

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN MATA AIR
SUMBER AGUNG SEBAGAI KAWASAN LINDUNG DAN
KAWASAN WISATA
(Studi Wisata Mata Air Sumber Agung Pekon Margoyoso Kabupaten
Tanggamus Provinsi Lampung)**

THESIS

Oleh

Fadel Aliemsyah Darmawan
2026061003



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

ABSTRAK

Desa memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dan pembangunan. Desa wisata, yang memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal, menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan Mata Air Sumber Agung sebagai kawasan lindung dan wisata di Pekon Margoyoso, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), metode peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dengan teori Edwards III (1980), yang mendasarkan 4 (empat) faktor dikatakan berhasil, menunjukkan: **Komunikasi:** 1) Transmisi, yang kurang jelas teridentifikasi pada tahap implementasi Perde menjadi SOP, 2) Kejelasan, komunikasi terjadi dialog langsung dan pesan dalam hal operasional, informasi berhasil disampaikan dengan jelas dan cepat, 3) Konsistensi, berkelanjutannya objek wisata tidak hanya didukung oleh saluran komunikasi yang berkelanjutan, tetapi juga oleh komunikasi konten yang mendalam dan terperinci, dari berbagai pihak.

Selanjutnya peneliti menemukan: **Sumber Daya:** 1) Sumber Daya Manusia, implementasi pengelolaan objek wisata mata air Sumber Agung menghadapi kendala signifikan dalam hal pengembangan sumber daya manusia, 2) Sumber Daya Anggaran, kekurangan dalam finansial untuk pengembangan sarana dan prasarana tetap menjadi kendala utama, 3) Sumber Daya Peralatan, beberapa fasilitas dasar yang telah tersedia di objek wisata mata air Sumber Agung, masih ada banyak aspek infrastruktur yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, 4) Sumber Daya Kewenangan, pengelola yang tidak menerima SK resmi menghadapi ketidakpastian dan kurangnya legitimasi dalam menjalankan tugas mereka. **Disposisi:** 1) Pengangkatan Birokrasi, pembentukan pengelolaan objek wisata oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes, 2) Insentif, insentif bagi pengelola terutama berbentuk upah harian, tetapi masih tergolong rendah.

Terakhir adalah temuan **Struktur Birokrasi:** 1) Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP), tugas dan tanggungjawab yang diikuti oleh pengelola, berpatokan langsung dengan Peraturan Pekon Margoyoso, Nomor: 141/001/56.07/2020, hal ini menjadi kelemahan karena tidak adanya SOP yang dibuat, 2) Melaksanakan Fragmentasi, penyebaran tanggungjawab pada tingkatan pengelola, beberapa jabatan tidak menjalankan fungsinya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Edwards III (1980), komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

ABSTRACT

Villages play an essential role in the national economy and development. Tourism villages, which utilize natural beauty and local culture, are one of the main strategies for improving the welfare of village communities. This research focuses on implementing policies for managing Sumber Agung Springs as a protected tourist area in Pekon Margoyoso, Tanggamus Regency, Lampung Province. Using Edwards III (1980) policy implementation theory, the research method is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques use observation, interviews, and collecting supporting documents. Data was analyzed by collecting, reducing, presenting, and drawing conclusions.

The results of research using Edwards III (1980) theory, which is based on 4 (four) factors that are said to be successful, show Communication: 1) Transmission, which needed to be identified at the Perde implementation stage into SOP. 2) Clarity, communication occurs in direct dialogue and messages in operational matters, and information was successfully conveyed clearly and quickly; 3) Consistency, the sustainability of tourist attractions is supported by continuous communication channels and in-depth and detailed content communication from various parties.

Furthermore, the researchers found Resources: 1) Human Resources, implementation of the management of the Sumber Agung spring tourist attraction faces significant obstacles in terms of human resource development; 2) Budget Resources, lack of finances for the development of facilities and infrastructure remains the main obstacle, 3) Equipment Resources, several basic facilities are available at the Sumber Agung spring tourist attraction, there are still many infrastructure aspects that need to be repaired and upgraded, 4) Authority Resources, managers who do not receive an official decree face uncertainty and lack of legitimacy in carrying out their task. Disposition: 1) Appointment of Bureaucracy, establishment of management of tourist attractions by the Village Government through BUMDes, 2) Incentives, incentives for managers are mainly in the form of daily wages, but are still relatively low.

Lastly are the findings of Bureaucratic Structure: 1) Creating Standard Operating Procedures (SOP), duties, and responsibilities followed by managers, based directly on Pekon Margoyoso Regulations, Number: 141/001/56.07/2020; this is a weakness because there is no SOP in place created, 2) Carrying out fragmentation, spreading responsibilities at the management level, some positions do not carry out their functions.

Keywords: Policy Implementation, Edwards III (1980), communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN MATA AIR SUMBER
AGUNG SEBAGAI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN WISATA
(Studi Wisata Mata Air Sumber Agung Pekon Margoyoso Kabupaten
Tanggamus Provinsi Lampung)**

OLEH

FADEL ALIEMSYAH DARMAWAN

Tesis

**Sebagai Salah satu Syarat Untuk mencapai Gelar
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

Pada

**Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN MATA AIR SUMBER AGUNG SEBAGAI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN WISATA (Studi Wisata Mata Air Sumber Agung Pekon Margoyoso Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Fadel Aliemsyah Darmawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2026061003**

Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENGETAHUI

Ketua Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Dr. Suropto, S.Soz., M.A.B.
NIP.196902261990031001

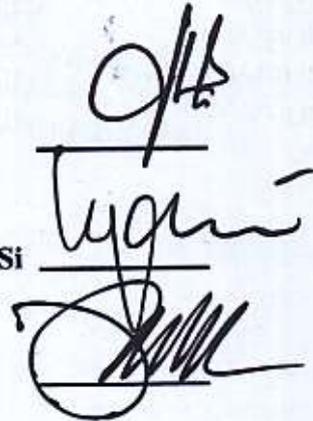
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP, M.AP

Sekretaris : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP, M.Si

Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu.Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2001

3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 10 Juni 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis/Laporan Akhir ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Bandar Lampung 10 Juni 2024

Yang membuat Pernyataan



Fadel Aliem
Fadel Aliemsyah Darmawan

NPM. 2026061003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fadel Aliemshyah Darmawan lahir di Bandar Lampung 08 November 1996. Anak tunggal dari pasangan Bapak Bambang Darmawan dan Ibu Ailiana. Suami dari Putri Nursela dan seorang bapak dari anak laki-laki bernama Khalid Alghazi Darmawan. Jenjang pendidikan yang penulis tempuh dimulai dari TK PKK Talang Padang tahun 2001-2002, pendidikan Sekolah Dasar di SD N 1 Banding Agung tahun 2003-2009. Selanjutnya peneliti menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Talang Padang tahun 2009-2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Talang Padang dan lulus tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung (Unila) melalui jalur SIMANILA dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tahun 2015 dan di tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Pemerintahan. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam berbagai organisasi internal dan eksternal kampus diantaranya HMJ Ilmu Pemerintahan sebagai Ketua Umum dan anggota biasa pada HMI Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan S-2 di Program Pascasarjana Ilmu Administrasi konsentrasi publik tahun 2020 di FISIP Universitas Lampung.

MOTO

AL ILMU BILA AMALIN KASYAJARIN BILA TSAMARIN

FA INNA MA'AL USRI YUSRA

INNA MA'AL USRI YUSRA

(QS AL-INSYIRIAH : 5-6)

**KETIKA MENJADI KAKI, JADILAH KAKI YANG BERJALAN
KETIKA MENJADI TANGAN, JADILAH TANGAN YANG BERGERAK
KETIKA MENJADI KEPALA. JADILAH KEPALA YANG BERPIKIR
(FADEL ALIEMSYAH DARMAWAN)**

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalaamiin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat atas rahmat dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu nikmat pun, baik itu nikmat iman, nikmat ilmu maupun nikmat amal.

Shalawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat Islam, yang telah membawa kita semua umatnya dari zaman kekelepan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Dengan niat dan usaha yang tulus, juga Ridho Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwasanya, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini, karena keterbatasan dna pengetahuan yang penulis miliki, semoga hal tersebut tidak merubah niatan dari seorang penulis untuk mempersembahkan tulisan dari hasil penelitiannya. Teriring salam dan do'a serta ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. menjabat Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. menjabat Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Suropto, S.Sos, M.Si. menjabat Ketua Program Studi Megister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Dr. Dedy Hermawan, selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran serta membagikan pengalaman sehingga dapat mendukung penyelesaian tesis ini.

6. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP., selaku Pembimbing Utama yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan hal-hal baru terkait penyusunan sebuah karya tulis ilmiah serta selalu memotivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Dr. Susana Indriyati C, M.Si., selaku Dosen selaku pembimbing kedua yang telah memberikan kritik dan saran serta membagikan pengalaman sehingga dapat mendukung penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua, Papa dan Mama. Bapak Bambang Darmawan dan Ibu Ailiana, inspirasi hidup juga pahlawan kehidupan, yang telah mendidik membesarkan juga menyekolahkan anaknya hingga bisa lulus sampai tingkat Srata 2 seperti sekarang ini. Maaf belum bisa membahagiakan dan membanggakan papa dan mama. Tapi percayalah selalu ada niat dan usaha yang tulus dari anaknya untuk bisa membahagiakan kedua orangtuanya. Tetap selalu do'akan semoga menjadi anak yang sholeh, sehat dan sukses kedepannya. Semoga papa dan mama juga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
9. Istriku tercinta Putri Nursela dan anakku yang sholeh Khalid Alghazi Darmawan. Terima kasih telah memberikan cinta, kasih sayang dan do'a yang tiada henti untuk kemudahan dan kesuksesan suaminya. Terima kasih juga untuk pengertian dan kesabaran mu selama ini. Penyemangat hidup, pelengkap kehidupan, terus saling menguatkan dan saling mendo'akan, semoga kita semua sehat, diberikan kemudahan dan kesuksesan kedepannya untuk tetap bisa sama-sama membesarkan Al menjadi anak yang sholeh dan bermanfaat bagi semua orang. Tanpa ummah dan Al, papa bukan siapa-siapa.
10. Ibu dan kakak-kakak ipar ku. Terima kasih atas dukungannya, sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu.
11. Saudara tak sedarah, Yogi Eriyanta, Yoga Dwi Cahyo, Roy Andrean, Ali, Riko Bacok. Terima kasih selalu suport, dari yang selalu direpotkan minjamkan laptop sampai nemani penulis penelitian dilapangan. Tetap jadi keluarga yang solid, sederhana tapi bukan yang dihina-hina, maju dan sukses terus bersama kedepannya.

12. Secara tidak langsung, untuk siapapun itu, saudara, kawan yang mensupport dan mendoa'kan penulis. Semoga do'a-do'a yang baik kembali lagi ke orang-orang yang telah baik mendo'akan.

Akhir kata, penulis ucapan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya, apabila terdapat kesalahan penulisan dan kekurangan. Adapun penulis menyadari tesis ini jauh dengan kata sempurna. Namun penulis berharap, semoga penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, refrensi dan manfaat bagi semua kalangan.

Bandar Lampung 19 Juni 2024

Fadel Aliemsyah Darmawan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kebijakan Publik	12
2.3. Konsep dan Model Implementasi Kebijakan	13
2.3.1. Teori Edwards III	15
2.3.2. Teori Merilee S. Grindle.	21
2.4. Tinjauan Tentang Pariwisata	22
2.5. Kerangka Berfikir	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	26
3.2. Objek dan Subjek Penelitian	27
3.3. Fokus Penelitian	28
3.4. Jenis dan Sumber	30
3.5. Informan Penelitian	30
3.6. Instrumen Penelitian	32
3.7. Teknik Pengambilan Data	33
3.8. Keabsahan Data	35
3.9. Teknik Analisis Data	37
BAB IV. GAMBARAN UMUM	
4.1. Gambaran Umum Desa Margoyoso	40

4.1.1. Visi dan Misi Margoyoso	40
4.1.2. Profil Desa Margoyoso	43
4.1.3. Sarana dan Prasarana	44
4.1.4. Struktur Organisasi	47
4.1.5. Kawasan Lindung Dan Kawasan Wisata Mata Air Sumber Agung ..	51

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. HASIL PENELITIAN	53
5.1.1. Komunikasi	53
5.1.1.1. Transmisi	54
5.1.1.2. Kejelasan	56
5.1.1.3. Konsistensi	58
5.1.2. Sumber Daya	59
5.1.2.1. Sumber Daya Manusia	60
5.1.2.2. Sumber Daya Anggaran	62
5.1.2.3. Sumber Daya Peralatan	64
5.1.2.3. Sumber Daya Kewenangan	66
5.1.3. Disposisi	68
5.1.3.1. Pengangkatan Birokrasi	69
5.1.3.2. Insentif	71
5.1.4. Struktur Birokrasi	72
5.1.4.1. Membuat <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	72
5.1.4.2. Melaksanakan Fragmentasi	73
5.1.5. Faktor Pendukung dan Penghambat	78
5.1.5.1. Faktor Pendukung	78
5.1.5.2. Faktor Penghambat	80
5.2. PEMBAHASAN	84
5.2.1. Komunikasi	84
5.2.1.1. Transmisi	85
5.2.1.2. Kejelasan	86
5.2.1.3. Konsistensi	87
5.2.2. Sumber Daya	90

5.2.2.1. Sumber Daya Manusia	90
5.2.2.2. Sumber Daya Anggaran	92
5.2.2.3. Sumber Daya Peralatan	95
5.2.2.4. Sumber Daya Kewenangan	97
5.2.3. Disposisi	99
5.2.3.1. Pengangkatan Birokrasi	100
5.2.3.2. Insentif	101
5.2.4. Struktur Birokrasi	103
5.2.4.1. Membuat <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	103
5.2.4.2. Melaksanakan Fragmentasi	106
5.2.5. Faktor Pendukung dan Penghambat	108
5.2.5.1. Faktor Pendukung	109
5.2.5.2. Faktor Penghambat	110

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN	113
6.2. SARAN	115

DAFTAR PUTAKA	118
----------------------------	------------

LAMPIRAN	122
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Desa Wisata Provinsi Lampung	3
Tabel 2. Alokasi Anggaran Mata Air Sumber Agung	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4. kebijakan Menurut Merilee S. Grindle	21
Tabel 5. Variabel Implementing Public Policy" oleh Edwards III	30
Tabel 6. Informan Penelitian	32
Tabel 7. Wilayah Pekon Margoyoso	44
Tabel 8. Sarana Dan Prasarana Desa Margoyso	45
Table 9. Audiens dalam Implementasi	55
Tabel 10. Pokok-pokok Peraturan Pekon Margoyoso	61
Tabel 11. Aset Fisik Objek Wisata	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perolehan PAD 2020-2025	6
Gambar 2. Teori Edwards III	19
Gambar 3. Teori Merilee S. Grindle	22
Gambar 4. Kerangka Pemikiran	25
Gambar 5. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman	37
Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margoyoso	47
Gambar 7. Struktur Organisasi Badan Hippun Pekon	48
Gambar 8. Struktur Koordinasi Objek Wisata	49
Gambar 9. Fasilitas Wisata Mata Air Margo Yoso.....	66
Gambar 10. Struktur Koordinasi Objek Wisata	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ijin Penelitian	122
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	123
Lampiran 3. Foto-Foto Pengamatan	135
Lampiran 4. Hasil Wawancara	137
Lampiran 5. Hasil Wawancara Berdasarkan Perdes	150
Lampiran 6. Dokumentasi	159
Lampiran 7. Peraturan Pekon Margoyoso	161
Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian	167

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan katup penyanggah perekonomian negara. Desa juga memiliki peran yang sangat strategis dalam laju pembangunan nasional. Dari desa, kita bisa melihat keindahan dan kemakmuran yang dimiliki alam dan masyarakat sekitarnya. Pariwisata salah satunya, menjadi sektor unggulan di Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat, kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 3,83% hingga september 2023 lalu. Angka ini sudah lebih tinggi dibandingkan pada tahun lalu sebesar 3,6% (Bayu, 2023).

Sektor pariwisata seakan menjadi garansi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pariwisata yang notabene berada di desa-desa, menjadikan panggung pertumbuhan ekonomi yang harus mampu disentuh dan dirasakan langsung oleh berbagai kalangan. Hal ini bisa dilihat dari data yang berhasil peneliti himpun, yang menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2022, sektor pariwisata telah berhasil menyumbang sebesar Rp 6.848.713 miliar terhadap PDB atau USD 115.440 juta dalam bentuk devisa, serta menciptakan 21,26 juta lapangan kerja (Gumilar, 2019). Angka-angka ini mencerminkan betapa pentingnya sektor pariwisata dalam memacu pertumbuhan ekonomi, tidak hanya melalui kontribusi finansial tetapi juga melalui peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif menjadi krusial untuk memastikan manfaat ekonomi ini dapat terus dirasakan oleh masyarakat desa dan membantu mengangkat kesejahteraan mereka.

Tujuan negara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945

salah satu point pentingnya ialah, memajukan kesejahteraan umum. Adapun sebagai upaya yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka diperlukan sinergitas dan pembangunan nasional yang terencana mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa sebagai satuan pemerintah terendah (Yusuf, 2024). Hal ini sejalan dan dipertegas dalam jurnal Nurul & Suci (2022), pemerintah Indonesia menjadikan desa sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun pembangunan nasional dapat dimulai dari ruang lingkup Pemerintah Daerah karena mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan, sehingga desa menjadi tolak ukur dalam mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desa yang merupakan unit terkecil dalam tatanan pemerintah, harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena pengembangan pedesaan ialah komponen integral dari pengembangan nasional. Sehingga, pemerintah, harus dapat menempatkan pedesaan sebagai pusat pembangunan, agar dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan. Hal ini sejalan dalam jurnal Neshafi (2021), untuk mengambil peluang tersebut, wilayah desa yang memiliki potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya perlu diarahkan menjadi desa wisata, dan untuk mewujudkan sebuah desa menjadi desa wisata diperlukan suatu daya tarik, ketersediaan dan kemudahan akses serta fasilitas yang memadai.

Desa wisata merupakan salah satu program yang digunakan untuk menggali setiap potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Desa wisata adalah desa yang memiliki tempat wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan manusia yang dikembangkan langsung oleh masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui sektor pariwisata. Berdasarkan Statistik Potensi Desa 2018, Kemendesa PDTT, Indonesia memiliki jumlah total 7.275 desa wisata yang tersebar di seluruh provinsi (Dinarwan, 2024). Direktur Pengembangan Destinasi 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sri Utari Widyastuti mengatakan bahwa di Provinsi Lampung ada sebanyak 129 desa yang

perlu terus dikembangkan. Provinsi Lampung sendiri Dia merincikan 129 desa wisata itu terdiri dari 97 desa wisata rintisan, 25 desa wisata berkembang, dan 7 desa wisata maju (Kanafi, 2023). Rincian jumlah desa wisata di Provinsi Lampung menggambarkan betapa besarnya peluang bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan:

Tabel 1. Jumlah Desa Wisata Provinsi Lampung

No	Nama Kabupaten	Jumlah Desa Wisata
1	Kabupaten Lampung Utara	25
2	Kabupaten Pesawaran	20
3	Kabupaten Waykanan	10
4	Kabupaten Lampung Barat	14
5	Kabupaten Lampung Timur	8
6	Kota Metro	1
7	Kabupaten Pesisir Barat	15
8	Kabupaten Tanggamus	9
9	Kabupaten Lampung Tengah	2
10	Kabupaten Tulang Bawang	1
11	Kabupaten Pringsewu	3
12	Kabupaten Lampung Selatan	13
13	Kota Bandar Lampung	3
14	Kabupaten Mesuji	2

Sumber: lampung.jadesta.com (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa desa wisata menjadi salah satu daya tarik wisata yang tumbuh dengan cepat dan ada di setiap daerah. Karena mempunyai keunikan tersendiri dan mencerminkan potensi-potensi yang ada di setiap desa. Namun, desa wisata tidak hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang berkelanjutan bagi komunitas lokal serta melestarikan warisan budaya dan lingkungan yang berharga (Dinarwan, 2024). Untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan dan kompetitif, terdapat beberapa kendala di beberapa lokasi desa wisata, antara lain:

1. Minimnya kepemimpinan dan kolaborasi.
2. Perencanaan yang kurang matang.

3. Duplikasi produk wisata yang sering terjadi karena kurangnya inovasi.
4. Kompetensi dalam mengelola kunjungan wisatawan yang rendah.
5. Pengelolaan sampah dan penanganan dampak lingkungan yang kurang baik, sehingga menurunkan minat calon wisatawan untuk berkunjung.
6. Publikasi informasi destinasi wisata yang kurang efektif dan keterlambatan dalam penanganan keluhan konsumen (Dinarwan, 2024).

Selain itu, masalah wisata desa yang dikelola BUMDes sangat rawan gagal dan tidak berkembang. Tercatat ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia kondisinya tidak aktif. Dari 45 ribu BUMDes yang ada, sebanyak 15 ribu diantaranya mangkrak. Hal ini dikemukakan oleh Rudy Suryanto, Founder Bumdes.id, saat gelaran Village Investment Forum (Kafa, 2019). Hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti objek wisata desa yang dikelola BUMDes. Salah satunya adalah Tanggamus, merupakan kabupaten yang dikenal dengan sebutan Bumi Begawi Jejama, memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam seperti pegunungan, air terjun, hingga pantai. Selain wisata alam, Tanggamus juga menawarkan wisata budaya seperti prasasti batu bedil dan desa wisata sailing, serta wisata buatan seperti ruang terbuka hijau Muara Indah dan Bukit Idaman.

Salah satu yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Tanggamus adalah wisata mata air Sumber Agung yang terletak di Desa Margoyoso Gunung Batu Kecamatan Sumberejo. Terletak di dataran tinggi kecamatan Sumberejo, wisata mata air yang semula menjadi kawasan hutan lindung, kini telah terbuka untuk umum menjadikan wisata mata air sumber agung sebagai objek wisata dan dikelola langsung oleh pemerintah desa pekon Margoyoso. Tahun 2020 adalah awal wisata mata air Sumber Agung ini dikembangkan dan sekarang merupakan salah satu penghasilan desa yang besar di Lampung. Melalui pemerintah desa yang dibantu oleh BumDes dan pengelola mata air, menjadikan objek wisata mata air sumber agung kini dikenal sampai luar daerah. Dalam pengembangannya, pemerintah desa margoyoso, melalui anggaran dana desa telah mengeluarkan anggaran untuk merevitalisasi pengembangan wisata mata air tersebut. Berikut data anggaran yang telah

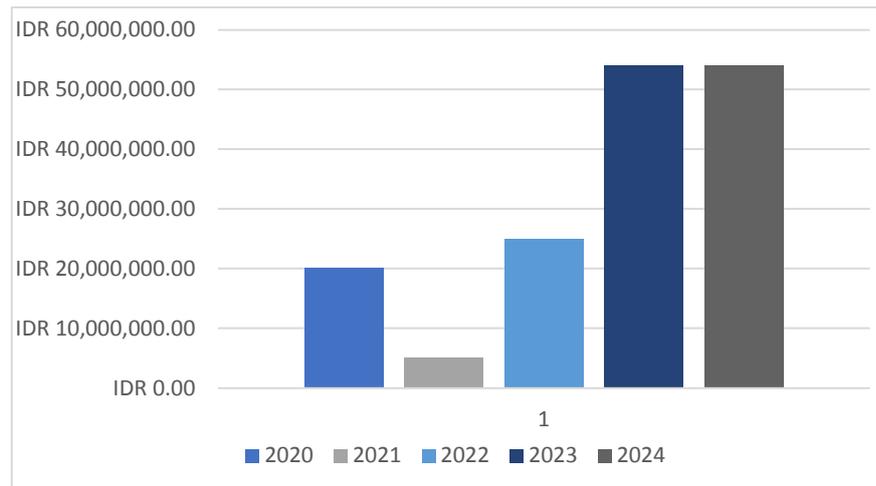
dikeluarkan pekan Margoyoso untuk wisata mata air Sumber Agung, sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Mata Air Sumber Agung

Tahun	Jumlah	Sumber Dana	Keterangan
2020	60 juta	ADD	Pembangunan kolam renang pada kawasan mata air
2021	-	-	Tidak ada
2022	-	-	Tidak ada
2023	-	-	Tidak ada
2024	150 juta	ADD	Pembangunan tempat wisata dan pengembangan kawasan wisaa mata air Sumber Agung

Sumber: Data Primer Pekan Margoyoso (2023)

Data diatas menunjukkan, bahwa Desa melalui alokasi dana desa memiliki upaya untuk membuat dan merencanakan program yang dianggap perlu, bermanfaat dan berguna bagi kepentingan semua golongan. Tetapi, hal ini terlihat pada hasil PAD dari objek wisata yang mengalami stagnan pada tahun 2023 dan 2024 dengan PAD masing-masing, sebear 54 juta rupiah, dikarenakan pemerintah desa mengkontrakan dan menargetkan kepada BumDes, PAD yang diberikan kepada pemerintah desa. Berikut adalah tingkat perolehan PAD pertahunnya dari lima tahun terakhir:



Gambar 1. Grafik Perolehan PAD 2020-2025 pada Objek Wisata Air Sumber Agung

Sumber: Data Primer Wawancara, perkiraan PAD wisata air Sumber Agung

Pada tahun 2020, menunjukan kondisi normal dengan pengelolaan yang berjalan baik, PAD di kisaran 20-25 juta menunjukkan bahwa objek wisata Mata Air Sumber Agung memiliki daya tarik yang stabil untuk objek wisata baru. Pada tahun 2021, penurunan signifikan akibat pandemi COVID-19. Pembatasan sosial dan penurunan drastis dalam jumlah pengunjung menyebabkan pendapatan turun ke 5-10 juta. Ini menunjukkan kerentanan sektor pariwisata terhadap situasi global yang tidak terduga. Pada tahun 2022, masa transisi dengan penyesuaian protokol kesehatan. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan bertahap dan adaptasi wisatawan serta pengelola terhadap kondisi baru yang lebih aman. Pada Tahun 2023 dan 2024 PAD sebesar 54 juta, masa pemulihan penuh dengan jumlah pengunjung yang meningkat drastis. Target PAD yang didapat sebesar 54 juta per tahun oleh pemerintah desa, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa dalam dua tahun ini objek wisata tidak mengalami peningkatan.

Pengelolaan wisata mata air Sumber Agung, mengalami perkembangan dengan proses yang tergolong lambat, bercermin pada pasal 5 (Pengelolaan) dan pasal 9 (Keuangan) dari Perdes nomor 141 tahun 2020, pada pasal 5 Ayat 1-7: Mengatur

bahwa pengelolaan dilakukan oleh pemerintah pekon melalui BUMDes. Hal ini menggarisbawahi pentingnya manajemen yang terstruktur dan transparan dalam pengelolaan wisata. Pasal 9 Ayat 1-5, menyebutkan sumber pendapatan termasuk pungutan masuk, parkir, kebersihan, dan sewa kios. Sistem pungutan yang terorganisir membantu dalam pencatatan keuangan yang akurat dan transparan, mendukung kenaikan PAD pasca-pandemi. Asumsi awal ini, yang menarik peneliti untuk mengangkat fokus masalah implementasi kebijakan, dengan lokus mata air Sumber Agung untuk diteliti dan memberikan dampak yang baik kedepannya.

Hadirnya undang-undang desa menjadi modal besar pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan. Pemerintah desa tidak lagi hanya bertugas menyelenggarakan rumah tangganya, melainkan juga memiliki kuasa dan ruang yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Diantaranya berkaitan dengan memetakan, menghadirkan dan mengurus potensi wisata yang dimiliki desa. Dalam hal ini pekon Margoyoso, peneliti akan meneliti peraturan pekon tentang **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mata Air Sumber Agung Sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Wisata di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mata Air Sumber Agung sebagai Kawasan Lindung dan Wisata di Pekon Margoyoso merupakan upaya strategis untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam sekaligus melestarikan lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Berikut adalah masalah-masalah yang ingin dipecahkan peneliti:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mata Air Sumber Agung Sebagai Kawasan Lindung dan Wisata di Pekon Margoyoso?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam Impelementasi kebijakan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan mata air sumber agung Pekon Margoyoso Kabupaten Tanggamus
2. Mendeskripsikan dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan mata air sumber agung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Implementasi kebijakan pengelolaan mata air Sumber Agung sebagai kawasan lindung dan wisata di pekan Margoyoso, memiliki beberapa kegunaan:

1. Secara Teoritis:

- a. Pengembangan Teori Kebijakan Publik: Menambah wawasan dalam bidang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata.
- b. Literatur Akademis: Menyediakan referensi baru bagi penelitian selanjutnya tentang pengelolaan kawasan lindung dan wisata, terutama yang berbasis desa.
- c. Model Implementasi Kebijakan: Mengembangkan model atau kerangka kerja yang dapat diterapkan di daerah lain dengan karakteristik serupa.
- d. Evaluasi Kebijakan: Memberikan bahan evaluasi untuk peneliti kebijakan publik dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan di sektor pariwisata dan lingkungan.

2. Secara Praktis:

- a. Rekomendasi Kebijakan: Menyediakan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata.
- b. Strategi Pengelolaan: Memberikan strategi konkret bagi pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan.

- c. **Pelibatan Masyarakat:** Mengarahkan cara-cara efektif untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wisata, sehingga meningkatkan partisipasi dan keuntungan ekonomi lokal.
- d. **Pengelolaan Sumber Daya:** Membantu dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan manusia yang lebih efisien untuk mendukung pengembangan kawasan wisata dan lindung.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, atau yang dikenal sebagai tinjauan literatur, merupakan suatu kajian dan rujukan yang relevan berdasarkan studi-studi sebelumnya. Tinjauan literatur ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang kuat dalam memahami konteks penelitian yang sedang dilakukan. Melalui kajian literatur, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, mengkonfirmasi temuan sebelumnya, dan menetapkan posisi penelitian baru dalam lanskap akademis yang lebih luas. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk membandingkan dan mengkontraskan temuan-temuan lama dengan penelitian yang akan diteliti selanjutnya.

Konteks pengelolaan kawasan lindung dan wisata, literatur yang ada dapat membantu peneliti untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, memahami dinamika sosial-ekonomi yang terkait, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, tinjauan literatur tidak hanya menyediakan kerangka acuan teoretis tetapi juga membantu dalam merumuskan hipotesis, metodologi penelitian, dan interpretasi hasil yang lebih komprehensif dan kontekstual. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Penelitian Hasil
1	Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa	Van Meter dan Van Horn: 1. Ukuran	bahwa Implementasi Kebijakan BUMDes dalam Pengembangan Desa Wisata belum sepenuhnya

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Penelitian Hasil
	(BUMDes) dalam Pengembangan Desa wisata (Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Sidoarjo. (Nurul & Suci, 2022)	kebijakan 2. Sumber daya 3. Komunikasih 4. Karakteristik 5. Agen Disposisi	berhasil karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki BUMDes Sambimadu masih belum memadai dan berkompeten, Karakteristik yang Ditunjukkan pegawai BUMDes sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga menganggap sepele tugas dan tanggungjawabnya serta kemampuan kognisi yang belum paham sepenuhnya mengenai Kebijakan BUMDes Sambimadu dalam pengembangan Desa Wisata. Disisi lain terdapat dukungan dari adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan BUMDes Sambimadu karena setiap minggu melakukan evaluasi kegiatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada proses Implementasi Kebijakan BUMDes
2	Implementasi Kebijakan Desa Wisata Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Jawa Timur (Nidaud, 2022)	Charles. O.Jones 1. Organisasi 2. Interpretasi 3. Aplikasi	Pelaksanaan peraturan sudah dijalankan dengan baik. Karena adanya tiap indikator-indikator pada Desa Wisata Semen. Faktor yang mendukung implementasi adalah tingginya kesadaran masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata disertai dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan adalah belum adanya road map desa wisata yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan Sebagian akomodasi di adakan menggunakan sumber daya miliki pribadi. Selain itu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Penelitian Hasil
			ruang sekretariat serta kantor UMKM baik untuk pembuatan maupun pemasaran masih berada pada satu rumah warga.
3	Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran (Gartiwi, dkk 2022)	Grindle 1. Konteks kebijakan 2. Konteks implementasi	Menghasilkan simpulan bahwa belum efektifnya implementasi kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh faktor- faktor yang ada dalam konten kebijakan (Content Policy).

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Penelitian di atas mencerminkan gambaran dari pendekatan teori yang berbeda dengan hasil penelitian yang beragam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Edwards III (1980), dipilih peneliti untuk mengamati empat unsur penting yaitu, komunikasih, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi dalam konteks implementasi kebijakanpengelolaan mata air sumber agung sebagai kawasan lindung dan wisata di Pekon Margoyoso, sumberejo tanggamus.

2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang

saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Cochran dan Malone, 2010). Berikut kebijakan menurut para ahli:

Kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Anderson, 1994). Kebijakan adalah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhi (Jones, 1997). Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publi/pemerintah maupu privat/swasta dalam memecahkan masalah publik (Knoepfeel, dkk, 2007: 21). Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich dalam Wahab, 2016: 9).

Dapat disimpulkan ddefinisi umum Kebijakan (Policy) adalah digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan penting untuk mempererat kehidupan dalam organisasi pemerintahan dan privat. Harus bebas dari konotasi politis yang mengandung makna keberpihakan. Dicitrakan oleh perilaku yang konsisten dan berulang dari pembuat kebijakan dan pihak yang menaatinya. Sedangkan definisi Kebijakan Publik (Public Policy), merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan, termasuk keputusan untuk tidak bertindak. Dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

2.3. Konsep dan Model Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses dari sebuah pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu, untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. (Pressman dan Widavsky dalam Wahab 2004).

Cara mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant 2004).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran itu ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, salah satu teori yang dipakai peneliti.

2.3.1. Teori Edwards III (1980)

Teori ini, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut Edwards III (1980), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Edwards III (1980) juga menyatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi penting:

a. Dimensi Transmisi (*Transmission*)

Kebijakan publik harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang tepat mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan.

b. Dimensi Kejelasan (*Clarity*)

Kebijakan yang ditransmisikan harus jelas sehingga pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengetahui maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Kejelasan ini membantu masing-masing pihak untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

c. Dimensi Konsistensi (*Consistency*)

Kebijakan yang diambil harus konsisten untuk menghindari kebingungan di antara pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsistensi dalam kebijakan membantu memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan selaras dengan tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya

Edwards III (1980), menyatakan bahwa sumber daya memiliki peran penting dalam

implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah variabel penting dalam keberhasilan kebijakan. Edwards III (1980) mengatakan, "sumber daya yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah staf." Edwards III (1980) juga menambahkan bahwa seberapa jelas dan konsisten perintah implementasi, jika personel yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai, implementasi tidak akan efektif.

b. Sumber Daya Anggaran

Edwards III (1980) menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dan oposisi warga membatasi akuisisi fasilitas yang memadai, yang pada gilirannya membatasi kualitas layanan yang bisa diberikan. Keterbatasan anggaran menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edwards III (1980) juga menyebutkan bahwa kurangnya insentif federal merupakan penyebab utama kegagalan program. Ia menyimpulkan bahwa keterbatasan anggaran akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan, menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan disposisi pelaku kebijakan menjadi rendah.

c. Sumber Daya Peralatan

Edwards III (1980) menyatakan bahwa sumber daya peralatan adalah sarana untuk operasionalisasi kebijakan, termasuk gedung, tanah, dan sarana lainnya yang memudahkan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Fasilitas fisik adalah sumber daya kritis dalam implementasi: meskipun implementor memiliki staf yang cukup, pemahaman yang jelas, dan wewenang, tanpa gedung, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan, implementasi tidak akan berhasil.

d. Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang penting adalah kewenangan. Menurut Edwards III (1980), kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri mempengaruhi pelaksanaan kebijakan oleh suatu lembaga. Kewenangan ini penting saat menghadapi masalah yang memerlukan keputusan segera. Oleh

karena itu, pelaku kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri dalam melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Menurut Edwards III (1980), disposisi didefinisikan sebagai "kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai." Edwards III (1980) juga menyatakan bahwa agar implementasi kebijakan berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edwards III (1980) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan meliputi:

1. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana dapat menjadi hambatan nyata bagi implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan warga masyarakat.

2. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya, orang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Dengan memanipulasi insentif, para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Menambah keuntungan atau biaya tertentu bisa menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik, sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

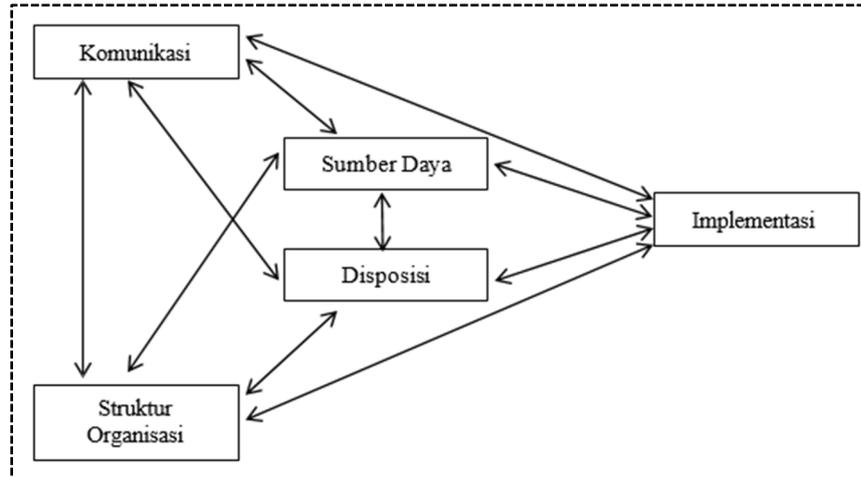
Menurut Edwards III (1980), ada dua karakteristik utama birokrasi yaitu: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". Winarno (2005) menyatakan

bahwa "*Standard operational procedure* (SOP) berkembang dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edwards III (1980) menambahkan bahwa kejelasan standar operasi, mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, serta tanggung jawab di antara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan antar organisasi pelaksana turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, menurut hasil penelitian Edwards III (1980), SOP dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru atau tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebutuhan kebijakan akan perubahan dalam cara kerja yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar kemungkinan SOP menghambat implementasi.

Edwards III (1980) menjelaskan bahwa "fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Edwards III (1980) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan kemungkinan kegagalan komunikasi karena besar kemungkinan instruksi terdistorsi. Semakin terdistorsi pelaksanaan kebijakan, semakin intensif pula kebutuhan akan koordinasi.

Para ahli telah mengusulkan berbagai model implementasi, termasuk model implementasi kebijakan publik oleh Van Metter dan Van Horn (1975), George Edwards III (1980), Grindle (1980), serta Mazmanian dan Sabatier (1987). Menurut Edwards III (1980), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.



Gambar 2. Teori Edwards III

Sumber: Edwards III (1980)

Sumber-Sumber Penting Menurut Edwards III (1980):

1. Staf yang Memadai
 - a. Pentingnya jumlah staf yang cukup untuk melaksanakan berbagai tugas yang diemban.
 - b. Keahlian khusus yang dibutuhkan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
2. Wewenang
 - a. Adanya otoritas yang diperlukan untuk menerjemahkan kebijakan dari usulan di atas kertas menjadi tindakan nyata.
 - b. Kemampuan untuk membuat keputusan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara langsung.
3. Fasilitas yang Diperlukan
 - a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas publik.
 - b. Peralatan dan teknologi yang membantu dalam menjalankan layanan publik dengan lebih baik.
4. *Standard Operating Procedures (SOP)*:
 - a. SOP merupakan prosedur kerja standar yang dikembangkan untuk memastikan efisiensi dan keseragaman dalam organisasi.
 - b. SOP membantu mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya yang

dimiliki para pelaksana.

- c. SOP sangat penting dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas untuk menjaga konsistensi operasional.
5. Fragmentasi:
- a. Fragmentasi terjadi akibat tekanan eksternal yang mempengaruhi unit-unit birokrasi.
 - b. Tekanan ini bisa berasal dari komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang diterapkan.
 - c. Fragmentasi dapat menyebabkan perpecahan dalam struktur birokrasi dan mempengaruhi koordinasi serta efisiensi pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi yang efektif sangat bergantung pada sumber daya yang memadai dan sistem operasional yang jelas. Edwards III (1980) menekankan bahwa staf yang cukup dengan keahlian yang tepat sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas publik secara efisien. Selain itu, wewenang dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

Di sisi lain, struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP membantu dalam menciptakan prosedur kerja yang standar, yang menjadi jawaban atas keterbatasan waktu dan sumber daya, serta kebutuhan akan keseragaman dalam organisasi yang luas dan kompleks. Fragmentasi, yang berasal dari berbagai tekanan eksternal, dapat menyebabkan unit-unit birokrasi terpecah dan menghambat koordinasi. Tekanan ini bisa datang dari komite legislatif, kelompok kepentingan, dan pejabat eksekutif, serta sifat kebijakan itu sendiri yang mempengaruhi bagaimana birokrasi pemerintah beroperasi.

Dengan memahami pentingnya sumber daya dan struktur birokrasi yang efektif, diharapkan implementasi kebijakan publik dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dan tujuan kebijakan.

2.3.2. Teori Grindle M.S. (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Grindle M.S. (1980), dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program itu didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) mengemukakan model Grindle M.S. (1980) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Ide dasarnya adalah bahwa, setelah kebijakan ditransformasikan, baru implementasi kebijakan itu dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

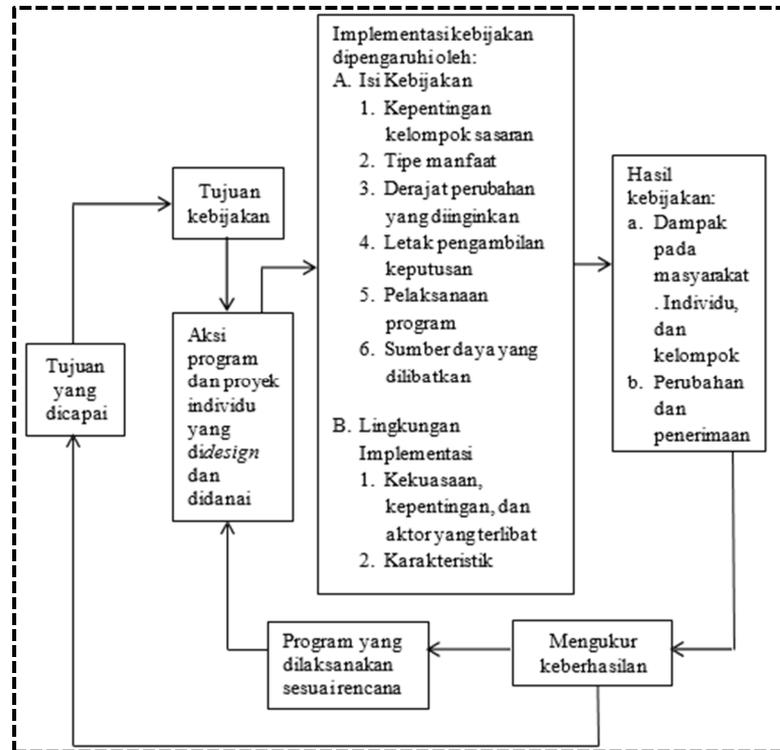
Tabel 4. kebijakan Menurut Grindle M.S. (1980)

No.	Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.	Konteks Implementasi
1	Jenis manfaat yang akan dihasilkan.	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2	Derajat perubahan yang diinginkan.	Karakteristik lembaga dan penguasa.
3	Kedudukan pembuat kebijakan.	Kepatuhan dan daya tanggap.
4	(Siapa) pelaksana program.	
5	Sumber daya yang dihasilkan	

Sumber: Merilee S. Grindle (1980)

Keunikan dari model Grindle (1980) terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor,

penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi dan sumber daya implementasi yang diperlukan. Berikut adalah gambaran menyeluruh dari teori yang dikemukakan Grindle (1980):



Gambar 3. Teori Merilee S. Grindle

Sumber: Grindle M.S. (1980)

2.4. Tinjauan Tentang Pariwisata

Etimologis, kata "pariwisata" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua bagian: "pari" yang berarti "banyak" atau "berkeliling", dan "wisata" yang berarti "pergi" atau "bepergian". Dengan demikian, pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan secara berulang atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan kata "tour", dan untuk makna yang lebih luas atau jamak, istilah "tourism" digunakan. (Yoety, 1996) dalam Setiawan (2015). Daya Tarik Wisata Menurut Cooper dkk (1995) dalam Setiawan (2015). Mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction*, *accessibility*, *amenity* dan *ancillary*.

1. *Attraction* (Atraksi)

Komponen penting dalam menarik wisatawan adalah atraksi wisata. Sebuah wilayah bisa menjadi destinasi wisata jika kondisinya mendukung pengembangan atraksi tersebut. Atraksi wisata inilah yang dikenal sebagai modal atau sumber daya pariwisata. Untuk mengidentifikasi potensi pariwisata suatu daerah, harus mempertimbangkan apa yang dicari oleh wisatawan. Tiga jenis modal atraksi yang menarik wisatawan adalah sumber daya alam, atraksi wisata budaya, dan atraksi buatan manusia. Modal pariwisata ini bisa dikembangkan di lokasi di mana modal tersebut ditemukan, menciptakan atraksi yang dapat menarik dan menahan wisatawan selama beberapa hari serta mendorong kunjungan berulang. Atraksi wisata menjadi alasan utama dan motivasi bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat wisata.

2. *Amenity* (Fasilitas)

Amenitas mencakup semua fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan oleh wisatawan selama mereka berada di destinasi wisata. Fasilitas ini meliputi penginapan, rumah makan, transportasi, dan agen perjalanan. Dengan infrastruktur yang memadai, dapat dibangun fasilitas pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, dan gedung pertunjukan. Infrastruktur penting untuk mendukung fasilitas pariwisata mencakup jalan raya, suplai air, listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, dan telepon. Pembangunan infrastruktur biasanya harus mendahului fasilitas pariwisata, meskipun terkadang keduanya dibangun bersamaan. Sebuah lokasi dapat berkembang menjadi tujuan wisata jika memiliki aksesibilitas yang baik. Terdapat hubungan timbal balik antara fasilitas dan infrastruktur: infrastruktur menjadi syarat untuk pembangunan fasilitas, sementara keberadaan fasilitas dapat meningkatkan kualitas infrastruktur.

3. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas merupakan komponen vital dalam pariwisata. Semua jenis transportasi dan layanan transportasi menjadi kunci dalam memudahkan wisatawan mencapai destinasi. Aksesibilitas sering dikaitkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tanpa aksesibilitas yang memadai seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya,

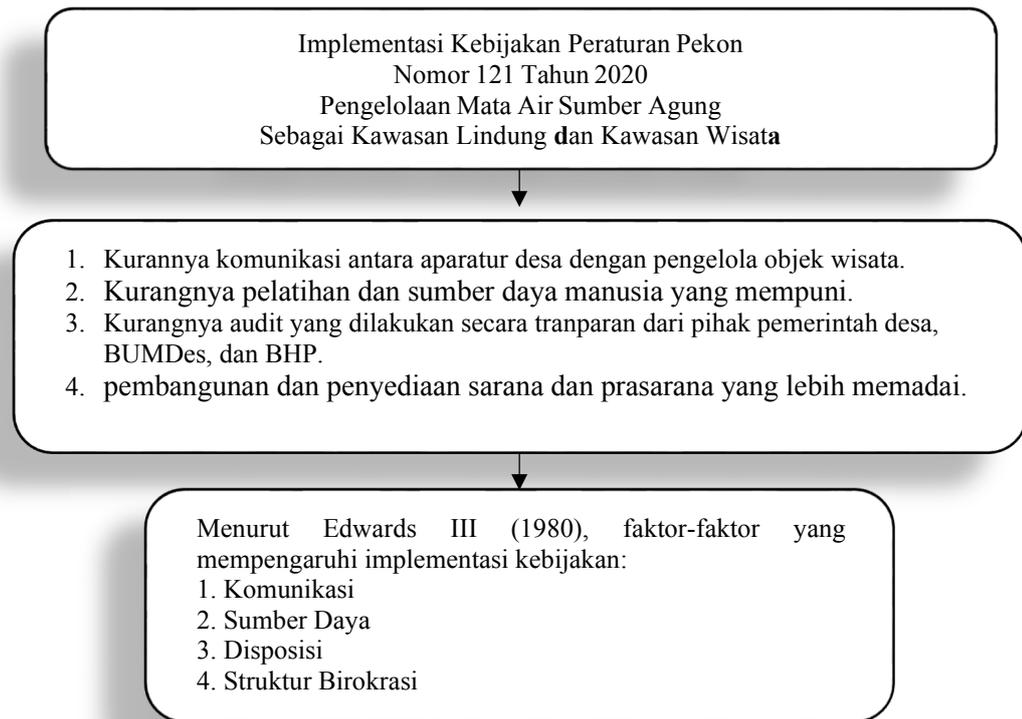
suatu daerah tidak akan menarik wisatawan dan menghambat perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Oleh karena itu, jika suatu daerah memiliki potensi wisata, maka perlu menyediakan aksesibilitas yang baik agar wisatawan dapat dengan mudah mengunjungi tempat tersebut.

4. *Ancillary* (Jasa pendukung Pariwisata)

Pemerintah daerah di destinasi wisata harus menyediakan layanan tambahan baik untuk wisatawan maupun pelaku pariwisata. Layanan ini meliputi pemasaran, pembangunan infrastruktur (seperti jalan raya, rel kereta, penyediaan air minum, listrik, dan telepon), serta koordinasi berbagai aktivitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di jalan raya dan objek wisata. *Ancillary* juga mencakup berbagai hal yang mendukung industri pariwisata, seperti lembaga pengelola, pusat informasi wisatawan, agen perjalanan, dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan.

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah fondasi intelektual dari sebuah penelitian yang mencerminkan sintesis dari berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang mempertimbangkan ruang lingkup dari satu atau lebih aspek yang diselidiki. Dalam judul penelitian ini, teori yang digunakan adalah konsep yang diajukan oleh Edwards III (1980), yang memperhatikan empat unsur kunci: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti membangun kerangka pikir untuk mengarahkan penyelidikan dengan memperhitungkan elemen-elemen ini secara holistik. Kerangka pikir tersebut akan menjadi panduan untuk analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan, membantu dalam memahami kompleksitas fenomena yang diteliti secara lebih terperinci. Berikut adalah kerang penelitian, yang dikemukakan peneliti:



Gambar 4. Kerangka Pikir

Sumber: Pemikiran peneliti dari teori Edwards III (1980)

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian metode penelitian mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian. Penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mata Air Sumber Agung Sebagai Kawasan Lindung dan Wisata di Pekon Margoyoso Sumberejo Tanggamus Lampung. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2014). Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Eko, 2015).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami (Moleong, 2014).

Alasan penulis memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan data yang diperoleh melalui teknik wawancara. Metode deskriptif yang digunakan dalam pengumpulan data, dengan fokus pada kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sesuai dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah desa Margoyoso dalam pengelolaan mata air sumber agung sebagai kawasan lindung dan wisata. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data seperti naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang konteks dan dinamika implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam, yang dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Dengan demikian, penggunaan metodologi kualitatif dianggap lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dan memahami konteks sosial dan budaya di dalamnya.

3.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang penulis agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan/atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apayang menjadi pusatperhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2015)

Peneliti sosial diharapkan jeli dan peka menangkap fenomena-fenomena yang muncul dalam ranah kehidupan sosial. Suatu fenomena dan praktik- praktik sosial yang layak diangkat sebagai fokus kajian penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan. Alasan pemilahan fokus penelitian ini untuk bagaimana dan sudah sejauh mana proses implementasi kebijakan pemerintah pekon Margoyoso dalam mewudukan wisata mata air Sumber Agung sebagai kawasan lindung dan wisata.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah landasan yang penting bagi setiap peneliti karena membantu dalam membatasi cakupan penelitian dan menetapkan arah yang jelas untuk penyelidikan. Seperti yang disebutkan oleh Moleong (2009), fokus penelitian adalah batas kajian yang ditetapkan, memungkinkan peneliti untuk menentukan data yang relevan dengan tema penelitian. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada proses implementasi kebijakan pengelolaan mata air sumber agung sebagai kawasan lindung dan wisata di Pekon Margoyoso, Sumberejo, Tanggamus, Lampung. Dengan menetapkan fokus ini, peneliti dapat dengan lebih efektif menyelidiki aspek-aspek tertentu dari implementasi kebijakan tersebut, seperti mekanisme pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Demikianlah, fokus penelitian menjadi kunci untuk mengarahkan upaya penelitian menuju pemahaman yang lebih mendalam dan analisis yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti., menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan indikator teori sebagai berikut:

1. Komunikasi: Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang

bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

2. Sumberdaya: Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Informasi merupakan sumberdaya juga penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung keputusan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.
3. Disposisi: Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor implementasi itu berjalan dengan baik atau tidaknya. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.
4. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Berikut ini adalah fokus penelitian yang digunakan peneliti, berdasarkan indikator "Implementing Public Policy" oleh Edwards (1980). Penelitian ini menyoroti empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, lalu melalui analisis mendalam terhadap keempat indikator ini, peneliti juga mengkaji bagaimana kebijakan pengelolaan Mata Air Sumber Agung sebagai

kawasan lindung dan wisata di Pekon Margoyoso diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut.

Tabel 5. Variabel Implementing Public Policy" oleh Edwards III (1980)

No.	Faktor	Dimensi	Keterangan
1	Komunikasi	Transmisi, Kejelasan, dan Konistensi	Komunikasi publik adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari satu pihak kepada khalayak luas melalui berbagai saluran komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu.
2	Sumber Daya	Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Peralatan, dan Sumber Daya Kewenang	sumber daya ini mencakup aspek tenaga manusia yang mencakup personel, finansial/keuangan, serta fasilitas.
3	Disposisi	Pengangkatan Birokrasi, dan Insentif	Petunjuk atau arahan yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki otoritas, seperti seorang atasan atau pejabat, tentang bagaimana suatu surat, dokumen, atau tugas harus ditindaklanjuti
4	Struktur Birokrasi	Membuat <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan Melaksanakan Fragmentasi	Organisasi harus memiliki hierarki yang jelas, koordinasi yang baik, spesialisasi dan pembagian tugas yang tepat, alokasi sumber daya yang memadai, fleksibilitas, serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif

Sumber: Edwards III (1980)

3.4. Jenis dan Sumber

Jenis dan sumber data merupakan elemen penting dalam proses penelitian, terutama dalam pendekatan kualitatif.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari proses wawancara dengan informan terkait,

yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan masalah penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan panduan tertentu untuk memastikan informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari Aparatur Pekon Margoyoso, seperti Kepala Pekon, Sekretaris Pekon, Ketua BUMDes, serta masyarakat atau pelaku usaha di sekitar Wisata Mata Air Sumber Agung.

2. Data Sekunder

Merupakan data tambahan yang melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder ini dapat berupa artikel-artikel dari surat kabar, majalah, atau website yang relevan dengan tema penelitian. Dengan memanfaatkan kedua jenis data ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menghasilkan analisis yang akurat.

3.5. Informan Penelitian

Para informan penelitian terdiri dari Aparatur Pekon Margoyoso, termasuk Kepala Pekon yang memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Selain itu, Sekretaris Pekon juga menjadi sumber informasi penting mengenai proses administrasi dan koordinasi di tingkat pekon. Ketua BUMDes memiliki pengetahuan yang relevan terkait pengelolaan objek wisata dan kegiatan ekonomi di desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat sekitar Wisata Mata Air Sumber Agung dan pelaku usaha lokal akan memberikan wawasan tentang dampak kebijakan pengelolaan terhadap kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi di desa tersebut. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, peneliti dapat memperoleh perspektif yang komprehensif dalam memahami implementasi kebijakan pengelolaan wisata di Pekon Margoyoso.

Tabel 6. Informan Penelitian

No	Informan	Alasan Memilih Informan
1	Kepala Pekon Margoyoso	Sebagai leader dan implemendor dari lahirnya peraturan pekon tentang pengelolaan mata air sumber agung sebagai kawasan lindung dan wisata
2	BHP	Sebagai pemberi saran, turut ikut merumuskan dari lahirnya peraturan pekon
3	BUMDes	Sebagai pelaksans dan bertanggungjawab atas pengelolaan wisata air Sumber Agung
4	Pengelola	Sebagai penjalan kebijakan Perdes, dan yang bersentuhan langsung menjaga dan menjalankan objek wisata.

(Sumber: Dikelola Oleh Peneliti)

Memahami kancah penelitian yang lebih aman, penulis berpikir untuk menemukansumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad dan Nugroho, 2014.)

Penulis memfokuskan informan di teras pemerintahan desa margoyoso, yang terdiri dari Kepala Pekon, BHP, BUMDes dalam hal ini pengurus atau pengelola wisata mata air. Alasan penulis memilih Informat di atas, dikarenakan penulis membutuhkan suatu data yang valid dan bijak untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen utama adalah peneliti sendiri, yang bertindak sebagai pengumpul data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode wawancara dan observasi, dengan menggunakan pencatatan tertulis dan digital.

Dengan menggunakan instrumen-instrumen tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan mata air Sumber Agung sebagai kawasan lindung dan wisata di Pekon Margoyoso.

3.7. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985), antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain (Moleong, 2017). Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini berbagai jawaban di utarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukaan, dan gender (Denzin & Lincoln, 2009).

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara penulis dan responden. Komunikasi terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka

sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal (Gulo, 2002). Jadi wawancara diartikan sebagai proses interaksi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai orang, organisasi, fenomena, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara yang sudah dan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara serta catatan-catatan wawancara terbuka dan wawancara takterstruktur. Peneliti melakukan wawancara penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperhatikan Topik Utama
Fokus penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan.
2. Menyusun Panduan Wawancara
 - a. Menentukan pertanyaan yang relevan dengan topik utama.
 - b. Mengatur jadwal wawancara meliputi kapan dan di mana wawancara akan dilakukan.
3. Melakukan Rekaman Percakapan
 - a. Melakukan rekaman percakapan dengan narasumber.
 - b. Meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber apakah mereka bersedia atau tidak untuk diliput dalam rekaman suara.

Tahapan selanjutnya, setelah melakukan wawancara yang dilakukan penulis ialah mentranskripkan hasil wawancara tersebut secara detail, mana yang bisa digunakan sebagai data dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah mengirimkan hasil wawancara dalam bentuk transkrip kepada narasumber kembali, gunanya adalah untuk mengecek jawaban yang diberikannarasumber sebelumnya dan juga sebagai transparansi data terhadap narasumber. Setelah itu penulis menganalisis data yang telah didapatkan secara menyeluruh dan memverifikasi validitasi dan juga reliabilitasi hasil analisis yang dilakukan peneliti.

Tahapan terakhir yang dilakukan penulis ialah menyusun laporan penelitian juga mempersentasikannya dan mempublikasikannya karena mengingat kritik

dan masukan menjadi bagian terpenting dalam proses penelitian ini. Alasan penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara adalah melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Dengan teknik wawancara data yang dibutuhkan akan lebih akurat karena diperoleh dari sumbernya. Penulis sudah melakukan metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara.

2. Dokumentasi, adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Sudaryono, 2017). Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan desa, SK Kepala Pekon untuk BUMDes, foto-foto bersama narasumber, tempat wisata mata air Sumber Agung, dan dokumentasi pendukung hasil dari wawancara.

Alasan penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yang sudah dilakukannya yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data- data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama. Aplikasi dari metode dokumentasi yaitu artikel- artikel yang dibaca peneliti.

3.8. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada tingkat keandalan, keakuratan, dan kepercayaan informasi yang terkandung dalam data (Moeloeng, 2018). Dalam konteks ini, keabsahan data menunjukkan sejauh mana dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk penggunaan yang dimaksud. Untuk memastikan keabsahan data, perhatian harus diberikan pada sumber data yang digunakan. Moeloeng (2018) mengungkapkan bahwa ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Standar kredibilitas/kepercayaan (*credibility*)

Standar tingkat kepercayaan untuk menentukan tingkat kepercayaan pada dasarnya merupakan validitas internal dalam penelitian kualitatif. Standar ini bertujuan untuk mengimplementasikan penyelidikan dengan cara yang memungkinkan pencapaian tingkat kepercayaan terhadap temuan, serta menunjukkan tingkat kepercayaan hasil temuan melalui pembuktian oleh peneliti terhadap realitas yang diteliti. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, melakukan observasi, menganalisis fenomena, dan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh melalui pendekatan beragam. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber

2. Keteralihan atau transferabilitas (*transferability*)

Keteralihan secara substansial, mengacu pada validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas ini dapat dicapai dengan menyajikan deskripsi yang terperinci dan komperhensif mengenai hasil dan konteks penelitian. Keteralihan bergantung pada kesamaan konsep antara pihak yang menyampaikan dan penerima informasi. Tujuan dari keteralihan memastikan bahwa orang lain dapat memahami hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam penelitian yang dibuat.

3. Dependensi atau dependabilitas (*dependability*)

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada dependensi. Suatu penelitian dianggap dependabilitas ketika orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, pengujian dependabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Pemeriksaan dependensi data dilakukan melalui pengecekan proses dan hasil penelitian oleh beberapa auditor yang dianggap mampu memberikan koreksi dan masukan yang berguna.

4. Ketentuan/konfirmabilitas (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu pada uji objektivitas penelitian. Objektivitas penelitian tercapai ketika hasil penelitian diterima banyak orang. Dalam

konteks penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas memiliki kesamaan dengan uji dependabilitas, sehingga keduanya dapat diuji secara simultan. Uji konfirmabilitas bertujuan untuk menguji keterkaitan antara hasil penelitian dan proses yang dilakukan.

3.9. Teknis Analisis Data

Pandangan Miles, Huberman and Saldana (2014) dalam Fiantika (2022) tentang analisis data kualitatif, mereka melihat analisis data dibagi dalam tiga aliran aktivitas paralel: (1) kondensasi data (*data condensation*), (2) presentasi data (*data display*), dan (3) inferensi/validasi (*conclusion drawing/verification*). Berikut ini akan dimelihat lebih dekat masing-masing komponen tersebut.

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian dan/atau transformasi data yang tampak pada seluruh korpus (tubuh) catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kompresi untuk membuat data lebih dapat diandalkan. (Miles, dkk tidak menggunakan istilah reduksi data karena artinya kita melemahkan atau kehilangan sesuatu dalam prosesnya).

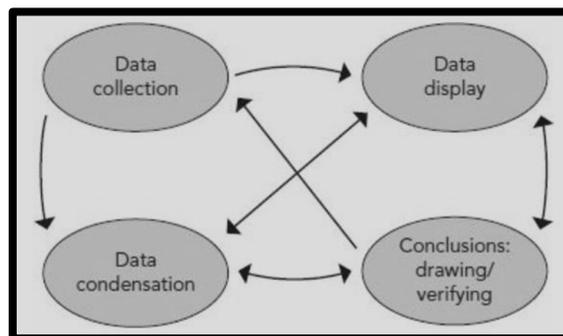
2. Tampilan Tata (*data display*)

Aliran utama kedua dari aktivitas analisis adalah tampilan data. Pandangan secara umum adalah sekumpulan informasi yang terstruktur dan ringkas dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik. Dalam kehidupan sehari-hari, tampilan berkisar dari pengukur gas hingga koran dan pembaruan status Facebook. Mengamati tampilan akan membantu peneliti memahami kemajuan dan mengambil analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman itu.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan aliran ketiga dari aktivitas analisis adalah menarik dan mengonfirmasikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan makna dengan merekam pola, penjelasan, kausalitas, dan asumsi. Peneliti membuat kompeten memperlakukan kesimpulan ini dengan ringan, menjaga keterbukaan dan skeptisisme, tetapi

kesimpulannya masih ada dan tidak jelas pada awalnya dan lebih jelas dan rasional di kemudian hari. Bergantung pada ukuran koleksi catatan lapangan, hasil "akhir" mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data selesai. Metode pengkodean, penyimpanan dan pengambilan yang digunakan; kecanggihan peneliti; peneliti harus memenuhi tenggat waktu.



Gambar 5. Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook Miles, Huberman and Saldana (2014) dalam Fiantika (2022).

Pengkodean data (kondensasi data) sering kali mengarah pada ide-ide baru tentang apa yang perlu dimasukkan dalam matriks data, yang kemudian membutuhkan kondensasi data tambahan untuk entri data. Ketika matriks terisi, kesimpulan awal bisa ditarik, yang dapat mengarah pada keputusan untuk menambah kolom baru dalam matriks guna mengonfirmasi kesimpulan tersebut. Dari perspektif ini, analisis data kualitatif adalah tugas yang berkelanjutan dan berulang, di mana proses kondensasi data, penyajian, dan validasi kesimpulan saling mengikuti secara berurutan. Proses ini secara konseptual tidak lebih kompleks dibandingkan metode analitis yang digunakan oleh peneliti kuantitatif.

Dalam korespondensi kualitatif, perhatian khusus diberikan pada kondensasi data, representasi, dan konfirmasi hasil, mirip dengan pendekatan kuantitatif yang lebih

sekuensial. Namun, peneliti kualitatif berada dalam posisi yang lebih cair dan humanistik, sehingga analisis kualitatif harus didokumentasikan dengan baik untuk mendukung pembelajaran. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang proses analisis data, refleksi, dan peningkatan metode agar dapat lebih bermanfaat bagi orang lain (Fiantika, 2022).

BAB IV. GAMBARAN UMUM

4.1. GAMBARAN UMUM DESA MARGOYOSO

4.1.1. Visi dan Misi Margoyoso

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Pekon. Penyusunan Visi Pekon Margo Yoso ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Pekon Margo Yoso seperti pemerintah Pekon, BHP, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Pekon dan masyarakat Pekon pada umumnya. Visi Pekon Margo Yoso adalah: *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Margo Yoso Yang Baik, Agar Tercipta Kehidupan Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Cerdas, Sejahtera, Milenial dan Agamis"*

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Pekon selama masa jabatan kepala Pekon. Untuk meraih Visi Pekon seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di Pekon yang berdasarkan Potret Pekon, Kalender Musim dan Kelembagaan Pekon, maka disusunlah Misi Pekon sebagai berikut:

- a. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat baik pemberdayaan Sumber daya manusia(SDM) maupun sumber daya alam(SDA)
- b. Menciptakan kondisi masyarakat Pekon Margo Yoso yang Agamis, bersih, sehat, Aman, Tertib, Guyup Rukun serta tidak terpolarisasi (terpecah belah) akibat politik maupun SARA
- c. Optimalisasi penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah pekan yang prima yaitu cepat, tepat, benar jujur dan transparan
- d. Mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program pembangunan Pekon
- e. Bersinergi dengan Pemerintah Daerah Tingkat I/II dan Pusat dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di pekan Margo Yoso
- f. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas
- g. Membangun struktur ekonomi desa yang tangguh dan berdaya saing
- h. Membuka akses ekonomi Pekon untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi warga
- i. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang nyaman huni dan bermartabat
- j. Melestarikan sumber mata air dengan pemberdayaan masyarakat, konservasi dan edukasi
- k. Peningkatan kualitas infastruktur, sarana dan prasarana Pekon

- l. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akses partisipasi mulai dari perencanaan implementasi dan pengawasan program-program Pekon Mengembangkan seni,tradisi budaya dan kearifan local dalam aspek membangun kohesi kehidupan masyarakat Pekon
- m. Mewujudkan Pekon yang berwawasan pengurangan resiko bencana dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat
- n. Membangun kolaborasi strategis berbasis potensi dengan pemerintah, dunia usaha dan Pekon lainnya

3. Arah Kebijakan Pembangunan Pekon

Kebijakan Pembangunan Pekon Margo Yoso akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain:

- a. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah Pekon dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan public
- b. Penataan administrasi pemerintahan Pekon
- c. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
- d. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
- e. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
- f. Peningkatan pengelolaan jalan Pekon, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain, menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Pekon.
- g. Menggali potensi di wilayah Pekon guna menambah PAD Pekon untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Pekon.
- h. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan - pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.

- i. Membantu para petani dalam permodalan.

4.1.2. Profil Desa Margoyoso

Margoyoso berasal dari nama Margo dengan arti Buat dan Yoso berarti Jalan, maka dapat diartikan kedua kata ini, Margoyoso adalah Membuat Jalan. Desa Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupateng Tanggamus sampai saat ini terdiri dari 7 (tujuh) Dusun / 26 (dua puluh enam) RT, dengan luas wilayah 865 Ha dan jumlah penduduk mencapai 5.462 jiwa dan jumlah KK mencapai 1.610 KK. Sebelum Tahun 1971 Desa Margoyoso masih merupakan wilayah Pedukuhan dan masuk wilayah Desa Sumberejo, wilayah Margoyoso dahulu tanah EX Erpah Bekas Perkebunan Teh dan Kopi yang dimiliki oleh penjajah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, dan banyaknya sumber daya lahan yang dapat diperdayakan, termasuk di Sumber Mulyo dengan setatus tanah dikuasai oleh CTN, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk yang datang dari pulau Jawa makin lama makin padat jumlah penduduknya.

Penduduk desa yang semakin berkembang secara pesat, sejak awal desa Sumberejo mencari pecahan baru, yaitu margoyoso, dengan cikal bakal mengelolah lahan bekas perkebunan teh dan kopi, pada tahun 1971 mekar menjadi desa sendiri, dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak dan kebutuhan semakin kompleks dalam hal pendataan dan penghimpunan kegiatan sosial, pecahan dari Desa Sumberejo yaitu Desa Margoyoso yang wilayahnya terdiri dari 13 pedukuhan atau bisa orang menyebutnya dusun atau lingkungan, yaitu:

Tabel 7. Wilayah Pekon Margoyoso

No	Wilayah	No	Wilayah
1	Pedukuhan Margoyoso	8	Dadapan
2	Pedukuhan Margodadi	9	Simpang kanan
3	Sumber Agung II	10	Argomulyo
4	Pedukuhan Margosari	11	Gunung Sari
5	Pedukuhan Tanjung sari	12	Simpang Rimba
6	Pedukuhan Gunung Batu	13	Simpang Rowo
7	Pedukuhan Sumber Agung		

Sumber: Data Desa Margoyoso, 2024

4.1.3. Sarana dan Prasarana

Selanjutnya sarana dan prasarana secara sejarah bahasa memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan prasarana (sarpras) tidak tersedia. Sebagai contoh, prasarana pendidikan berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, dll. Contoh lain dari pengertian sarana dan prasarana yaitu mobil, bus, motor, sepeda adalah sarana transportasi darat. Sedangkan jalan raya, rambu lalu lintas, jembatan, terminal adalah prasarana transportasi darat (kalisegoro.semarangkota.go.id. 2024).

Dengan kata lain, secara umum dari pengertian sarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak. Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan : menciptakan kenyamanan., menciptakan kepuasan, mempercepat proses kerja,

memudahkan proses kerja, meningkatkan produktivitas, dan hasil lebih berkualitas. Berikut ini adalah sarana dan prasarana desa Margoyoso:

Tabel 8. Sarana Dan Prasarana Desa Margoyoso

No.	Sarana	Jenis Sarana	Total
1	Ibadah	Masjid	11 Unit
		Mushola	13 Unit
		Gereja	-
		Pure	-
		Wihara	-
		Kapel	-
		Masjid	-
2	Pendidikan	Paud	1 Unit
		TK	4 Unit
		SD	5 Unit
		SMP/MTs	1 Unit
		SMA/MA	-
3	Pendidikan Khusus	Pondok Pesantren	3 Unit
		TPA	8 Unit
4	Budaya	Ketipung/Mawalah/Hadroh	9 Grup
		Pencak Silat	1 Grup
		Kuda Lumping	4 Grup
		Karawitan	-
		Kuntau	1 Grup
5	Olahrga	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
		Lapangan Bola Volly	4 Unit
		Lapangan Bulu Tangkis	1 Unit

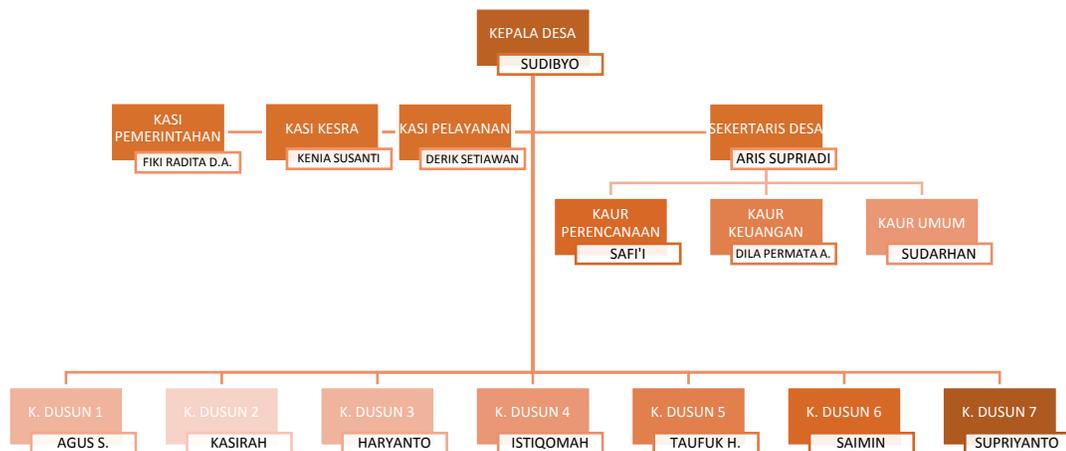
Tabel 9. Sarana Dan Prasarana Desa Margoyso

No.	Sarana	Jenis Sarana	Total
	Olahraga	Lapangan Tenis Meja	-
6	Pemakaman	Pemakaman Umum	4 Unit
		Pemakaman Kristen	-
7	Perhubungan	Jalan Provinsi	-
		Jalan Hotmix	7 Km
		Jalan Onderlagh	12 Km
		Jalan Tanah	8,2 Km
		Sepeda Motor	3.600 Unit
		Mobil	400 Unit
		Sepeda Ontel	1.500 Unit
8	Pertanian	Lahan Sawah	43 Ha
		Lahan Perkebunan	955,5 Ha
		Lahan Kering	73 Ha
		Lahan Pemukiman	258,5 Ha
9	Irigasi	Embung	-
		Mata air	2 Buah
		Drainase (terbangun)	1 Km -
		Drainase (belum terbangun)	4 Km-
		Jembatan	2 Km
10	Potensi Pendapatan Daerah/Penduduk Margo Yoso	BerdasarkanEvaluasi target Pendapatan PBB di wilayah Margo Yoson 2022	Rp. 24.731.769,-

Sumber: Data Desa Margoyoso, 2024

4.1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang ada di setiap pedesaan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal (www.lediknas.co.id, 2024). Berikut ini adalah struktur organisasi desa Margoyoso:

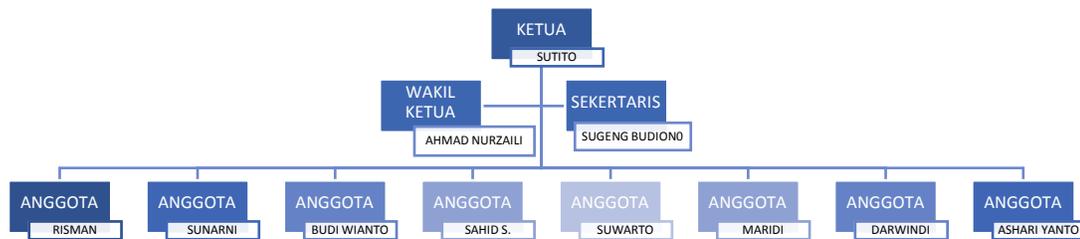


Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margoyoso, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus

Sumber: Data Desa Margoyoso, 2024

Selanjutnya adalah Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) atau yang di sebut dengan nama lain Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Melalui fungsinya

sebagai legislatif, BHP mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijaksanaan BHP harus berlandaskan terhadap kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat yang diwakilinya (Pahlovi, 2023). Berikut ini adalah struktur BHP desa Margoyoso:



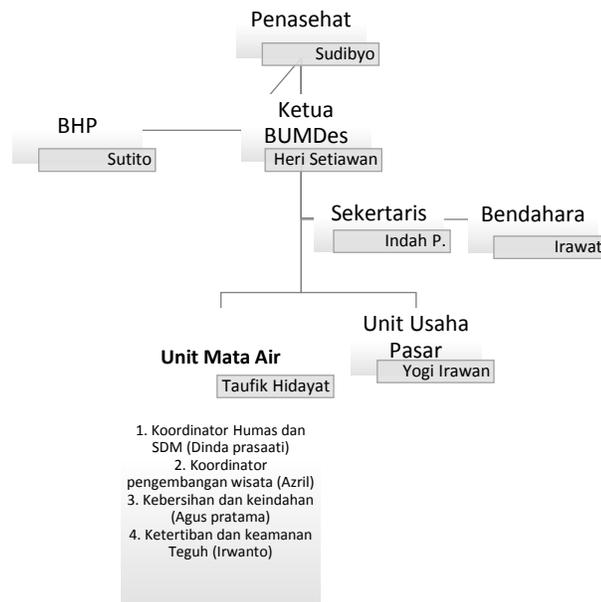
Gambar 7. Struktur Organisasi Badan HIPPUN Pekon

Sumber: Data Desa Margoyoso, 2024

BHP berfungsi secara umum untuk menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BHP Mempunyai Tugas Dan Wewenang Antara Lain:

1. Membahas Rancangan Peraturan Pemukiman Bersama Kepala Pekon.
2. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pekon Dan Peraturan Kepala Pekon.
3. Mengusulkan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Peron.
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pekon.
5. Menggali. Meriampung Menghimpun, Merumuskan Dan Menyaturkan Aspirasi Masyarakat. Dan
6. Menyusun Tata Tertib (*Data Desa Margoyoso, 2024*)

Berikutnya adalah BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Anwar, 2021). Berikut ini adalah struktur BUM Desa Margoyoso:



Gambar 8. Struktur Koordinasi Objek Wisata Mata Air Sumber Agung

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Gambar di atas menjelaskan bahwa struktur bumdes dari posisi tertinggi adalah kepala desa sebagai penasihat BumDes. Disusul terus dibawahnya sejajar berdiri pengawas bumdes dan operasional BumDes itu sendiri. Terdiri dari ketua sekretaris bendahara dan dua unit usaha bumdes yaitu unit usaha pertama mata air sumber agung dan kedua pasar desa margoyoso. Organ operasional bumdes dapat dipilih orang-orang yang nantinya bisa dan cakap dalam menjalankan roda organisasi. Sementara pengawas BumDes dikabat langsung oleh badan hippun pekon.

Penasihat Bumdes yang dikepala oleh kepala desa bertugas sebagai pelindung pelaksana operasional bumdes sepanjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Maksud pelindung dalam hal ini adalah tempat berkonsultasi sekaligus dapat membuka pintu-pintu komunikasih kerjasama dengan pihak lain. Sementara, pengawas BumDes yang diawasi langsung oleh BHP bertugas memastikan jalannya oeprasional bumdes sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

berlaku baik dengan sikap lainnya memberikan masukan-masukan, menanyakan dan mengawasi langsung daripada kegiatan yang ada.

Operasional Bumdes, menjalankan unit-unit bumdes, roda organisasi bumdes dengan baik dan profesional, bertanggung jawab kepada kepala desa dan diawasi langsung oleh badan hippun pekon. Adapun unit usaha bumdes margoyos terdiri dari dua unit usaha yang terdirergerak dibidang wisata mata air sumber agung dan pasar desa margoyoso. Dalam unit wisata mata air, terdapat empat koordinator didalamnya terdiri dari koordinator humas dan sdm, koordinator pengembangan wisata, koordinator kebersihan dan keaamanan, koordinator ketertiban dan keamanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merinci fungsi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dijelaskan bahwa tujuan BUMDes/BUMDes bersama adalah:

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas ekonomi, serta potensi desa.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, termasuk mengelola lumbung pangan desa.
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta memaksimalkan manfaat dari sumber daya ekonomi masyarakat desa.
4. Memanfaatkan aset desa guna menciptakan nilai tambah bagi aset desa.
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa (Pemerintah Pusat Indonesia, 2021).

Regulasi ini juga mendefinisikan desa sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anwar, 2021).

4.1.5. KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN WISATA MATA AIR SUMBER AGUNG

Kawasan Lindung adalah area yang ditetapkan dengan tujuan utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sumber daya buatan di dalamnya (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2022). Sedangkan setidaknya objek wisata, memiliki terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: *attraction*, *accessibility*, *amenity* dan *ancilliar*. Pada mata air Sumber Agung sebagai kawasan lindung dan kawasan wisata, yang dikelola pekon margoyoso, terdapat empat komponen tersebut dan termasuk dalam kawasan lindung yang dikelola desa Margo Yoso:

1. *Attraction* (Atraksi)

Atraksi wisata inilah yang dikenal sebagai modal atau sumber daya pariwisata, pada wisata air Sumber Agung yang menjadi fokus utama adalah atraksi dari sumber daya alam, yaitu sumber mata air yang indah dan dapat dinikmati, sekaligus sebagai kawasan lindung.

2. *Amenity* (Fasilitas)

Amenitas mencakup semua fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan oleh wisatawan selama mereka berada di destinasi wisata. Fasilitas infrastruktur pariwisata mencakup jalan raya, suplai air, listrik, tempat pembuangan sampah, kamar mandi, mushola dan kantin.

3. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas merupakan komponen vital dalam pariwisata. Semua jenis transportasi dan layanan transportasi menjadi kunci dalam memudahkan wisatawan mencapai destinasi. Pada objek wisata air Sumber Agung, layanan

akses jalan setapak dalam memasuki objek wisata, yang didukung jalan utama yang bisa dilalui mobil, motor dan alat transportasi darat lainnya.

4. *Ancillary* (Jasa Pelayanan Tambahan)

Ancillary juga mencakup berbagai hal yang mendukung industri pariwisata, pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan wisata Mata Air Sumber Agung sangat bergantung pada kombinasi komponen-komponen utama pariwisata. Atraksi wisata berupa sumber daya alam yang indah, seperti sumber mata air yang menjadi daya tarik utama sekaligus kawasan lindung, memainkan peran penting sebagai modal pariwisata. Fasilitas penunjang atau amenitas, seperti jalan raya, suplai air, listrik, kamar mandi, mushola, dan kantin, sangat penting untuk kenyamanan wisatawan selama mereka berada di destinasi. Aksesibilitas yang baik, termasuk jalan setapak yang memudahkan akses ke objek wisata, serta dukungan jalan utama untuk berbagai jenis transportasi darat, memastikan kemudahan bagi wisatawan untuk mencapai lokasi. Pelayanan tambahan seperti kebersihan, serta penyediaan makanan dan minuman, menambah nilai pengalaman wisatawan di lokasi tersebut. Kombinasi keempat komponen ini, menunjukkan bahwa wisata Mata Air Sumber Agung objek wisata yang menarik dan dapat menunjang kebutuhan pengunjung.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mata Air Sumber Agung sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Wisata (Studi Wisata Mata Air Sumber Agung Pekon Margoyoso Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung), dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.3. KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mata Air Sumber Agung Sebagai Kawasan Lindung dan Wisata di Pekon Margoyoso, dengan teori Edward III, yang mendasarkan 4 (empat) faktor dikatakan berhasil, antara lain faktor:
 - A. Komunikasi: 1) Transmisi, yang kurang jelas teridentifikasi pada tahap implementasi Perde menjadi SOP, 2) Kejelasan, komunikasi terjadi dialog langsung dan pesan dalam hal operasional, informasi berhasil disampaikan dengan jelas dan cepat, 3) Konsistensi, berkelanjutannya objek wisata tidak hanya didukung oleh saluran komunikasi yang berkelanjutan, tetapi juga oleh komunikasi konten yang mendalam dan terperinci, dari berbagai pihak.
 - B. Sumber Daya: 1) Sumber Daya Manusia, implementasi pengelolaan objek wisata mata air Sumber Agung menghadapi kendala signifikan dalam hal pengembangan sumber daya manusia, 2) Sumber Daya Anggaran, kekurangan dalam finansial untuk pengembangan sarana dan prasarana tetap menjadi kendala utama, 3) Sumber Daya Peralatan, beberapa fasilitas dasar yang telah tersedia di objek wisata mata air Sumber Agung, masih ada banyak aspek infrastruktur yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, 4) Sumber Daya Kewenangan, pengelola yang tidak menerima SK resmi menghadapi ketidakpastian dan kurangnya legitimasi dalam menjalankan tugas mereka.

- C. Disposisi: 1) Pengangkatan Birokrasi, pembentukan pengelolaan objek wisata oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes, 2) Insentif, insentif bagi pengelola terutama berbentuk upah harian, tetapi masih tergolong rendah.
 - D. Struktur Birokrasi: 1) Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP), tugas dan tanggungjawab yang diikuti oleh pengelola, berpatokan langsung dengan Peraturan Pekon Margoyoso, Nomor: 141/001/56.07/2020, hal ini menjadi kelemahan karena tidak adanya SOP yang dibuat, 2) Melaksanakan Fragmentasi, penyebaran tanggungjawab pada tingkatan pengelola, beberapa jabatan tidak menjalankan fungsinya.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Desa (Perdes) dalam pengelolaan objek wisata Mata Air Sumber Agung menunjukkan bahwa:
- A. Faktor pendukung: 1) keterlibatan multi-pihak, 2) pengaturan pemasukan, 3) komitmen operasional, dan 4) upaya pengembangan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
 - B. Faktor penghambat: 1) keterbatasan sumber daya dana dan SDM, 2) kurangnya penataan tempat usaha yang teratur, 3) kurangnya pengawasan dan transparansi, 4) kurangnya infrastruktur pendukung, 5) keterbatasan dukungan dari pihak eksternal, dan 6) ketidaksesuaian dengan peraturan.

Mengatasi faktor-faktor penghambat ini menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan objek wisata, sehingga langkah-langkah perbaikan dan strategi pengembangan yang lebih efektif perlu dirancang dengan memperhatikan semua aspek terkait. Dengan demikian, implementasi Perdes dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

5.4. SARAN

Saran untuk Pemerintahan Desa Margoyoso, BHP, dan BUMDes dalam Mengelola Mata Air Sumber Agung sebagai Kawasan Lindung dan Wisata di Pekon Margoyoso

Saran yang diberikan oleh peneliti terbatas pada pihak-pihak atau objek yang diteliti, diharapkan kedepannya pemerintah desa dan organisasi internal desa, dapat terus berkembang dan maju, sebagai

1. Pemerintahan Desa
 - a. Tetapkan sistem pelaporan yang ketat dan terjadwal, dengan monitoring berkala untuk memastikan BumDes melaporkan pendapatan setiap bulan sesuai dengan peraturan pekon. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - b. Lakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi anggota BumDes dan pengelola wisata agar mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata dengan profesional.
 - c. Fasilitasi program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan serta kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan terkait.
 - d. Aktifkan kerjasama dengan pihak ketiga yang potensial melalui realisasi proposal program yang konkret dan jelas, serta lakukan tindak lanjut yang terukur.
 - e. Tingkatkan upaya mendapatkan dana tambahan dari berbagai instansi dan sumber lain melalui proposal yang kuat dan mendetail. Pertimbangkan juga untuk mengadakan acara penggalangan dana atau kemitraan dengan sektor swasta.
 - f. Perkuat mekanisme komunikasi dengan masyarakat melalui forum-forum dialog terbuka dan musyawarah secara rutin. Pastikan kritik dan saran dari masyarakat didengar dan ditindaklanjuti.
 - g. Alokasikan dana desa dengan tepat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wisata, seperti jalan akses, kamar mandi, dan area parkir.

- h. Peningkatan insentif dan dukungan fasilitas untuk mendukung kemakmuran bagi pengelola objek wisata.
 - i. Membuat Legal Standing atau Legalitas Pelimpahan Pengelolaan, pemerintah Desa Margo Yoso perlu membuat dokumen legal standing atau legalitas formal untuk pelimpahan pengelolaan mata air dari desa ke BUMDes dan pengelola.
 - j. Memperkuat Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Desa yang ada perlu diperkuat karena masih lemah dalam beberapa aspek. Revisi dan pembaruan peraturan desa seharusnya dilakukan untuk mencakup ketentuan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab, kewenangan, dan mekanisme pengelolaan mata air.
 - k. Melibatkan Pendamping Desa Lebih Aktif, pendamping desa sebaiknya lebih diikutsertakan dan dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pengembangan mata air sebagai kawasan wisata.
2. BHP:
- a. Awasi pelaksanaan sistem pelaporan dan pastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran administrasi untuk memastikan ketertiban dalam pengelolaan.
 - b. Kerjasama dengan dinas pariwisata untuk membuat strategi pemasaran yang efektif guna menarik lebih banyak pengunjung.
3. BUMDes
- a. Buat dan jalankan program kolaborasi dengan investor atau mitra usaha yang bisa membantu dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata.
 - b. Manfaatkan pendapatan yang ada dengan efisien dan transparan, prioritaskan kebutuhan yang mendesak seperti pemeliharaan fasilitas dan peningkatan layanan wisata.
4. Pengelola Wisata
- a. Libatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan wisata, seperti event atau kegiatan promosi, untuk meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi mereka.

- b. Pastikan fasilitas wisata selalu dalam kondisi baik dan lakukan perawatan secara berkala untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
- c. Gunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan wisata mata air Sumber Agung, serta adakan event atau promosi khusus untuk menarik minat wisatawan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan Mata Air Sumber Agung sebagai kawasan lindung dan wisata di Pekon Margoyoso dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Agustinus, Leo. (2006). Politik dan Kebijakan publik. Bandung: AIPI
- Amjah, A., Agustino, L., & Arenawat, A. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1), 1-20.
- Anderson, James E. 1994. Public Policymaking: An Introduction, Edisi: 2nd. Penerbit: Houghton Mifflin Company
- Bungin, Burhan. 2015. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cochran, Charles L., & Malone, Eloise F. 2010. Perspectives and Choices, Edisi: 4th. Penerbit: Lynne Rienner Publishers
- Data Primer. 2023. Data Pekon Margoyoso. Diterbitkan Pemerintah: Pekon Margoyoso
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2009. Handbook of Qualitative Research (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C.: CQ Press.
- Eko, Y. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fuad, Anis dan Nugroho, Kandung Sapto. 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gartiwi, M. M., Irawati, R. Ira & Karlina, Nina. 2022. Implementasi Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran. Penerbit: Universitas Padjadjaran.
- Grindle, M. S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.
- Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.

- Hintalo, S., Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- Hutagalung, S. S., & Indrajat, H. (2021). Policy implementation on guidelines for new habits adaptation in Lampung Province: Survey on student groups. Universitas Lampung: International Conference on Social Sciences.
- Jones, Charles O. 1997. *An Introduction to the Study of Public Policy*, Edisi: 3rd. Penerbit: Wadsworth Publishing.
- Knoepfel, Peter, Corinne Larrue, Frederic Varone, & Michael Hill. 2007. *Public Policy Analysis*. Penerbit: The Policy Press, University of Bristol
- Laary, Y., Tulus, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 120(VIII), 60-67.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neshafi, Rahmadian. 2021. Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Pada Pengembangan Desa Wisata Tlahab. Vol 4, No 1. Diterbitkan: Universitas Tidar
- Nidaud, Diaba. 2022. Implementasi Kebijakan Desa Wisata Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penerbit: Instiut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nurul, Maulidah & Suci, Megawati. 2022. Implementasi kebijakan Badab Usaha Milik Desa (BumDes) dalam pengembangan Desa Wisata. Vol 10 Nomor 2 Tahun 2022, 391-406. Diterbitkan: Universitas Negeri Surabaya
- Pahlovi, Mirzi. 2023. Kinerja Badan Hippun Pemekonan (BHP) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Pekon. Publikasi: Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

- Pemerintah Pusat Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Pusat Indonesia: Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Puspawati, A. A., Asrori, K., Meiliyana, Rahmawati, L. & Monica, D. R.,. 2023. Analysis of the implementation of the Indonesian Migrant Family Guide Program. *Jurnal ULICoSS 2022*, ASSEHR 740, pp. 805–815, doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_777.
- Puspawati, A. A., Utoyo, B., & Suchmasasi, Y. 2023. Analysis of the implementation of domestic violence prevention in Indonesia. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(3), 379-392.
- Riant, N. R. (2004). *Kebijakan publik: Teori dan implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Setiawan, I. B. D. 2015. Identifikasi Potensi Wisata Beserta 4A (Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary) di Dusun Sumber Wangi, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar.
- Siregar, N. 2022. Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial Vol.1, No.7, Agustus 2022*.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Supriatna, A., Sihabudin, A. A., & Garis, R. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(4), 178-185. Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
- Tirayoh, G. A. T., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi kebijakan program Desa Digital dalam upaya kemajuan pelayanan publik di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 3(1). ISSN: 2088-2815.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Penerbit: Bumi Aksara
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

WEBSITE

- kalisegoro.semarangkota.go.id. 2024. Sarana Prasarana. Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://kalisegoro.semarangkota.go.id/saranaprasarana>
- lampung.jadesta.com. 2024. Desa Wisata. Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://lampung.jadesta.com/search?type=7&submit=1>
- www.lediknas.co.id. 2024. Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa. Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://www.lediknas.co.id/bimtek-aparatur-pemerintahan-des/>
- Gumilar, Pandu. 13/11/2019. KINERJA KUARTAL III/2019 "Prospek Cerah Emiten Lahan Industri". Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan https://koran.bisnis.com/read/20191113/442/1169711/kinerja-kuartal-iii-2019-prospek-cerah-emiten-lahan-industri?utm_source=desktop&utm_medium=search
- Kafa, Muhammad Zidny. 26-12-2019. Ribuan BUMDes Mangkrak Karena Usaha Tidak Berkembang. Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://www.panggungharjo.desa.id/ribuan-bumdes-mangkrak-karena-usaha-tidak-berkembang/>
- Anwar, Muhammad Choirul. 6-10-2021. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya?". Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/bumdes-adalah-badan-usaha-milik-des-apa-fungsinya?page=all>
- Kanafi, Ruth Intan Sozometa. 8-8-2023. Kemenparekraf sebut 129 desa wisata di Lampung terus dikembangkan. Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://www.antaraneews.com/berita/3672387/kemenparekraf-sebut-129-des-wisata-di-lampung-terus-dikembangkan>
- Bayu, Dimas. 26-12-2023. Data Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Indonesia hingga September 2023. Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://dataindonesia.id/pariwisata/detail/data-kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-indonesia-hingga-september-2023>
- Dinarwan, Aria Bantar. 12-2-2024. Kompetensi yang dibutuhkan oleh Pengelola Desa Wisata agar menjadi Desa Wisata Berkelanjutan. Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://bbppmddtt-jakarta.kemendesa.go.id/berita/2024-02-12/kompetensi-yang-dibutuhkan-oleh-pengelola-des-wisata-agar-menjadi-des-wisata-berkelanjutan/index.htm>
- Yusuf, Mochamad Aris. 2024. 4 Tujuan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. . Tanggal akses 17 Mei 2024, tautan <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-negara-indonesia-berdasarkan-uud/>